

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gerakan Pramuka merupakan nama organisasi pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kependuan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata "Pramuka" merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti Jiwa Muda yang Suka Berkarya. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani, dan rohani. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia, dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi anggota masyarakat yang baik, dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup, dan alam lingkungan.

Menurut Koentjoroningrat dalam bukunya berjudul Antropologi, menyatakan bahwa masyarakat dimulai dengan kehidupan kolektif dan definisi masyarakat pada umumnya yang tidak dapat hidup sendiri namun bersama sama mewujudkan keinginan bersama secara kolektif sebagai bagian dari unsur-unsur masyarakat yang dawali dari kesatuan-kesatuan hidup manusia yang nantinya mengerucut pada kesatuan yang lebih khusus lagi mulai dengan kategori sosial, golongan sosial, hingga pranata sosial. Gerakan Pramuka sebagai salah satu

Pranata sosial dalam masyarakat Indonesia melakukan keperdulian terhadap sesama hidup melalui kegiatan-kegiatan yang membentuk karakter dari peserta didik dalam hal ini anggota pramuka sehingga dapat berdampak secara luas terhadap karakter dari bangsa Indonesia. Kemudian untuk mencapai gugusdepan yang unggul dengan karakter yang dapat menjadi cerminan untuk bangsanya, menurut Bambang dan Suyatno dalam bukunya yang berjudul Kembali ke Gugusdepan harus dimulai dari sumber daya manusia yang baik. Berakhlak baik, sesuai dengan janji pramuka yang diajarkan oleh Baden Powell melalui *The Scout Law* kemudian diterjemahkan menjadi Dasa Darma di Indonesia. Sebagai kode kehormatan Gerakan Pramuka, maka Dasa Darma menjadi dasar dari pembentukan sumber daya manusia yang berkarakter sebagai cerminan dari bangsa Indonesia.

Perjalanan Gerakan Pramuka di Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Berawal dari didirikannya organisasi *Nederlandsche Padvinders Organisatie* (NPO) bentukan Belanda berlanjut tahun 1916, organisasi tersebut berganti nama menjadi *Nederlands-Indische Padvinders Vereeniging* (NIPV). Istilah *Padvinders* merujuk kepada istilah untuk organisasi Pramuka yang ada di negeri Belanda. Para tokoh kemudian mengganti istilah *Padvindery* dengan Pandu atau Kepanduan¹. Perjalanan organisasi kepanduan di Indonesia berakhir pada tahun 1961, dengan lahirnya Gerakan Pramuka. Keputusan ini dikarenakan banyaknya organisasi kepanduan yang berkembang di Indonesia.

¹ Zuli Agus Firmansyah.2015.*Panduan Resmi Pramuka*, Jakarta : Wahyu Media.hlm. 22-23

Peristiwa tersebut dikenal sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka.² Sebagai organisasi kepramukaan, Indonesia tergabung sebagai anggota *World Organization of the Scout Movement* (Wosm) sejak tahun 1953. Wosm adalah organisasi internasional non-pemerintah, independen, dan non-profit yang menaungi Gerakan Kepanduan di seluruh dunia. Wosm didirikan pada tahun 1920 dengan kantor pusat di Geneva, Swiss. Bidang-bidang yang berada dalam Wosm terdiri atas *World Scout Conference* dan *World Scout Committee*. Indonesia merupakan bagian dari anggota *World Organization of the Scout Movement* (Wosm) sejak tahun 1953.

Wosm adalah organisasi internasional non-pemerintah, independen, dan non-profit yang menaungi Gerakan Kepanduan di seluruh dunia didirikan pada tahun 1920 dengan kantor pusat di Geneva, Swiss. Sebagai anggota dari Wosm, maka Indonesia berhak mengirimkan delegasinya dalam kegiatan *World Scout Conference*. Pada 32nd *World Scout Conference* dilaksanakan pada tahun 1990 di Paris, salah satu keputusan dalam forum pramuka tingkat dunia tersebut adalah ditetapkannya Gerakan Pramuka Indonesia sebagai tuan rumah Perkemahan Wirakarya Dunia (*Comdeca*) I tahun 1993. Kwartir Nasional Gerakan Pramuka selanjutnya membentuk tim persiapan kegiatan yang akan memaparkan kepada seluruh Ketua Kwartir Daerah se-Indonesia dalam Rakernas tahun 1991. Hasil dari tim persiapan kegiatan tersebut menunjuk Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur sebagai lokasi dari kegiatan kepramukaan dunia tersebut dengan persiapan pelaksanaan dimulai sejak

² Alim Sutoto dan Toni Hermanto, SCOUT BOOK : Materi Lengkap Pramuka, (), hal 9-10

tahun 1990 hingga pelaksanaan kegiatan pada tahun 1993. Desa Lebakharjo dipilih oleh Kwratir Nasional Gerakan Pramuka sebagai kelanjutan dari kegiatan Perkemahan Wirakarya I Aspac (Asia Pasifik) sebelumnya yang juga dilaksanakan di Desa Lebakharjo. Kegiatan tersebut dikemas dengan karya nyata yang bermanfaat bagi sesama secara berkelompok (menurut jenjang kepramukaannya masing-masing siaga, penggalang, penegak dan pandega) sesuai arahan Baden Powell pada bukunya *Scouting For Boys* diterjemahkan oleh Leinovar pada tahun 2018.

Kegiatan bakti masyarakat yang ditawarkan oleh Indonesia terhadap anggota Wosm di seluruh dunia ini memberikan warna baru dalam aktifitas kepramukaan, sehingga tidak mudah untuk segera dilaksanakan apalagi melibatkan negara lain. Sehingga perlu proses panjang untuk membuktikan pada dunia bahwa kegiatan bakti adalah salah satu pilihan aktifitas yang bisa dimasukkan dalam kegiatan kepramukaan. Maka Indonesia mulai melakukan kegiatan bakti di tingkat daerah hingga nasional sebagai bagian dari upaya turut serta membangun masyarakat, kemudian sejak awal pembangunan Desa Lebakharjo didampingi oleh Gerakan Pramuka melalui Perkemahan Wirakarya di tingkat Cabang hingga Daerah dilanjutkan Peran Saka Nasional jauh sebelum Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Perkemahan Wirakarya Dunia (Comdeca) I.

Proses panjang itulah yang membuat Desa Lebakharjo dipilih menjadi lokasi Perkemahan Wirakarya Dunia (*Comdeca*) I. Selain memperkenalkan pada dunia tentang proses panjang bagaimana pramuka bergerak membangun

masyarakat dengan berperan aktif dalam setiap proses pembangunan di Desa Lebakharjo, kegiatan ini juga diharapkan sebagai penguat dari proses panjang tersebut untuk mendorong masyarakat Desa menjadi lebih berani lagi berkembang dalam berbagai aspek kehidupan terutama ekonomi. Setelah Gerakan Pramuka mendampingi pembangunan Desa Lebakharjo, dengan menghadirkan pramuka dunia membuktikan bahwa pengabdian Gerakan Pramuka tidak setengah-setengah. Kegiatan ini adalah pembuktian nyata bahwa berproses dengan waktu yang tidak sebentar dengan kesungguhan hati akan memberikan hasil yang maksimal.

Kegiatan-kegiatan sebelumnya, fokus pembangunan ada pada titik pusat Desa dengan harapan jantung Desa mampu berkembang dengan baik, masyarakat dapat mengolah hasil bumi dan kehidupan akan menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun fokus dari Perkemahan Wirakarya Dunia (*Comdeca*) I adalah memperhatikan kebutuhan desa-desa disekitarnya, agar dapat dicapai luasnya dampak kegiatan terhadap pertumbuhan pembangunan dan ekonomi yang merata. Selanjutnya, proyek-proyek kegiatan diarahkan untuk membuka jalur hubungan transportasi Dusun Licin agar pertumbuhan pembangunan dan ekonomi masyarakat Dusun Licin³ tertinggal dengan dusun lainnya. Pemikiran tersebut dikarenakan potensi Dusun Licin yang memiliki panatai indah serta hasil laut melimpah, ketika akses menuju Dusun Licin menjadi mudah maka diharapkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat dengan sendirinya.

³ Dusun Licin adalah satu dari 5 (lima) Dusun yang berada di Desa Lebakharjo, dusun ini dipisahkan dengan dusun lainnya oleh aliran sungai Glidik. Untuk mencapai Dusun Licin, masyarakat harus melintasi sungai Glidik yang jika musim hujan akan banjir dan musim kemarau mengering dengan hamparan pasir yang menjulang. Akses menuju Dusun Licin sangat sulit disaat musim hujan.

Harapan dari kegiatan Perkemahan Wirakarya Dunia (*Comdeca*) I dituangkan Tim Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur yang disunting oleh Suyatno dalam bentuk tulisan melalui Buku Lebakharjo Desa Pramuka Keberhasilan Bersama tentang wawancara tim Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur dengan warga Desa Lebakharjo tentang bagaimana kepramukaan tumbuh dan berkembang di Desa Lebakharjo. Buku ini merupakan kajian kembali setelah sejak tahun 1993, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur meninggalkan Desa dengan pembangunan Desa untuk diteruskan dan dikembangkan kembali oleh warga Desa.

B. Rumusan Masalah

Agar memudahkan dalam menjabarkan berbagai permasalahan dalam penelitian ini, maka disusunlah suatu rumusan masalah yang sistematis dan terukur sehingga permasalahan lebih mudah dijawab. Rumusan masalah dalam penulisan ini meliputi :

1. Bagaimana kondisi desa Lebakharjo sebelum adanya pembangunan melalui kegiatan Comdeca?
2. Bagaimana peran Gerakan Pramuka baik tingkat Nasional, Daerah dan Cabang dalam persiapan hingga pelaksanaan kegiatan Comdeca?
3. Bagaimana dampak dari kegiatan Comdeca yang dilakukan oleh Gerakan Pramuka bagi masyarakat desa Lebakharjo dan sekitarnya?

C. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka ruang lingkup kajian dibatasi baik secara tematis, spasial maupun temporal. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa cakupan masalah dalam penelitian ini sangat kompleks dan agar penelitian ini lebih terfokus pada titik persoalan sehingga dapat menjawab substansi permasalahan secara memadai.

Secara spasial, pembahasan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Ampel Gading, Desa Lebakharjo yang dahulunya merupakan lokasi Perkemahan Wirakarya Dunia I, namun tidak menutup kemungkinan daerah-daerah lain yang ada disekitar Desa Lebakharjo juga dijadikan lokasi penelitian guna memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai objek kajian ini. Secara tematis, sesuai dengan pernyataan masalah, maka fokus penelitian ini adalah proses pembangunan Desa Lebakharjo melalui Gerakan Pramuka. Pembahasan ini akan dimulai dengan kondisi desa sebelum adanya kegiatan melalui Gerakan Pramuka hingga proses berlangsungnya pembangunan melalui kegiatan Comdeca dengan peserta anggota kepanduan dari seluruh dunia serta dampak dari pembangunan tersebut bagi masyarakat desa Lebakharjo dan sekitarnya.

Sedangkan batasan temporalnya pada tahun 1990 saat ditetapkannya Indonesia sebagai tuan rumah kegiatan Comdeca oleh Wosm, kemudian Kwartir Nasional Gerakan Pramuka menetapkan Jawa Timur sebagai tuan rumah kegiatan dimulai dari proses persiapan hingga pelaksanaan kegiatan pada tahun 1991-1993 serta dampak dari pembangunan tersebut hingga tahun 2015.

D. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan penelitian ini memuat penjabaran tentang apa yang akan dicapai oleh peneliti secara langsung, hal tersebut dikarenakan peneliti menghindari kerancuan pada alur penulisan penelitian. Peneliti menuliskan tujuan dari penelitian dengan berdasarkan pada rumusan-rumusan. Berbeda dengan rumusan masalah, pada penulisan tujuan penelitian digunakan kalimat pernyataan bukan kalimat tanya. Berdasarkan judul dan latarbelakan yang telah disampaikan oleh penulis diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Memahami kondisi desa Lebakharjo sebelum adanya pembangunan melalui kegiatan Comdeca.
2. Memahami peran Gerakan Pramuka baik tingkat Nasional, Daerah dan Cabang dalam persiapan hingga pelaksanaan kegiatan Comdeca.
3. Memahami hasil dari kegiatan Comdeca yang dilakukan oleh Gerakan Pramuka bersama Gerakan Kepanduan seluruh dunia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa Lebakharjo dan sekitarnya

E. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat dari penelitian dan penulisan skripsi ini bagi sejarawan dapat berfungsi untuk memperkaya khasana penulisan Sejarah Nasional, khususnya Sejarah lokal Kabupaten Malang dan lebih spesifik lagi Desa Lebakharjo dan menambah referensi tentang penulisan karya yang erat kaitannya dengan pengkajian sejarah Desa Lebakharjo yang berkaitan dengan proses pembangunan

2. Manfaat dari penelitian dan penulisan skripsi ini bagi Gerakan Pramuka adalah menambahkan catatan tentang kiprah Gerakan Pramuka dalam perjalanannya turut serta dalam proses pembangunan
3. Manfaat dari penelitian dan penulisan skripsi ini bagi penulis lainnya diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penulisan selanjutnya dalam mengkaji yang relevan
4. Manfaat dari penelitian dan penulisan skripsi ini bagi Pemerintah Kabupaten Malang adalah memberikan kesadaran kepada pihak birokrasi bahwa pembangunan bukan hanya dilakukan bukan hanya bentuk fisik melainkan juga dapat diwujudkan dengan lebih meningkatkan penghasilan karya-karya yang akan dikenang sepanjang zaman termasuk hasil tulisan ilmiah

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan perbandingan terhadap penelitian sebelumnya, baik berhubungan dengan kekurangan dan kelebihan penulisan sebelumnya. Penelusuran pustaka dilakukan sebagai langkah awal dari kerangka penelitian sejenisnya. Sebuah upaya yang perlu dikembangkan dalam eksplorasi pustaka yaitu kemampuan menuangkan ide dan menulis dalam kajian pustaka dengan ini permasalahan yang sesuai.⁴

⁴ Sukari. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: PT. Bumi Aksara. Hlm 39

1. Sejarah Kepanduan Dunia

Kepanduan dunia berawal dari pemikiran seorang tentara Inggris yang menuliskan pengalamannya saat bertugas di Afrika dan India. Pemuda tersebut adalah Robert Stephenson Smyth Baden Powell dikenal dengan Baden Powell. Baden Powell tergabung dalam pasukan Hussars ke 13 di India pada tahun 1876, kemudian dari tahun 1888 – 1895 Baden Powell bertugas di India, Afganistan, Zulu, dan Ashanti. Kemudian bertugas sebagai staff dari pasukan Kerajaan Inggris (1896–1897), menjadi kolonel pasukan berkuda di Afrika Selatan (Pengalaman terkepung oleh bangsa Boer di Kota Mafeking, AfSel selama 127 hari kekurangan makanan), kemudian mengalahkan bangsa Zulu di Afrika dan mengambil kalung manik kayu milik raja Dinizulu.

Pengalamannya tersebut ditulis Baden Powell dalam buku “Aids to Scouting“ yang memuat cara menjelajahi hutan, diperlukan kecakapan tertentu, baik diperoleh dari alam ataupun tokoh masyarakat yang dilalui, seperti mengenali jejak perjalanan yang baru dilewati untuk keluar dari rimbunnya hutan, mengenali buah-buahan yang dapat dimakan, air yang boleh diminum, mengetahui arah mata angin tanpa melihat arah matahari karena rimbunnya hutan dan sebagainya. Untuk menguji kebenaran isi buku itu, 21 orang pemuda yang menamakan kelompok Boys Brigade mengundang Baden Powell bersama-sama membuktikannya mengadakan perkemahan di Pulau Brownsea pada tanggal 25 Juli 1907 selama 8 (delapan) hari peserta perkemahan melakukan pengembaraan menerapkan isi buku Aids to Scouting bersama Baden Powell.

Pengalaman dalam perkemahan tersebut dicatat setiap hari, pada akhir perkemahan catatan tersebut dikumpulkan menjadi satu oleh Baden Powell dijadikanlah sebuah buku dengan judul "Scouting for Boys" yang diterbitkan tahun 1908. Kelompok anak muda yang melakukan perkemahan di Brownsea tersebut mengubah nama kelompoknya dari Boys Brigade menjadi Boy Scout dan menjadikan Scouting For Boys sebagai buku panduannya. Kemudian ajaran Baden Powell ini berkembang dan berdirilah organisasi kepanduan-kepanduan (yang semua hanya untuk anak laki-laki berusia penggalang) yang disebut Boys Scout. Kemudian disusul berdirinya organisasi kepanduan putri yang diberi nama Girl Guides, atas bantuan Agnes adik perempuan Baden Powell dan diteruskan oleh Ny. Baden Powell dengan buku panduan Handbook Girl Guides

Baden Powell kembali ke Inggris tahun 1908 menjadi Letnan Jendral dianugrahi Ksatria tahun 1909, Pada tahun 1910 Baden Powell minta pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir Letjend. Ia menikah dengan Olave Clair Soames pada tahun 1912 dan dianugrahi tiga orang anak (Peter, Heather, Betty). Pada tahun 1912 berdiri pandu usia siaga yang disebut CUB (anak srigala) dengan buku Jungle Book berisi cerita tentang Mongli anak didikan rimba (anak yang dipelihara oleh Srigala) karangan Rudyard Kipling sebagai cerita pembungkus kegiatan Cub ini. Kemudian tahun 1918 Baden Powell membentuk Rover Scout (Pramuka usia Penengak) untuk menampung mereka yang sudah lewat usia 17 tahun tetapi masih sering giat di bidang kepanduan, dengan buku panduan Rovering to Success (Mengembara Menuju Kebahagiaan) yang telah diterbitkan tahun 1912.

Tahun 1920 para pandu sedunia berkumpul di Olimpia, London, Inggris dalam acara Jambore Dunia yang pertama. Ketika hari terakhir kegiatan jambore tanggal 6 Agustus 1920 Baden Powell diangkat sebagai Chief Scout of The World atau Bapak Pandu Sedunia. Sejak Tahun 1920 itu dibentuklah Dewan Internasional dengan 9 (sembilan) orang anggota dan Biro Sekretariatnya berada di London Inggris. Pada tahun 1929 Baden Powell mendapat gelar kehormatan "Lord" hingga namanya menjadi Lord Baden Powell of Gilwell dengan julukan Baron, gelar tersebut diberikan oleh Raja George V. Kemudian tahun 1958 Biro Kepanduan Sedunia (Putra) dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Terakhir pada tanggal 1 Mei 1968 dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss sampai sekarang. Biro Kepanduan Dunia (Putra) hanya mempunyai 40 orang staf yang ada di Geneva dan 5 kantor kawasan yakni : Costa Rica, Mesir, Philipina, Swiss dan Nigeria. Biro Kepanduan Dunia (Putri) sampai dengan sekarang tetap berada di London dan mempunyai 5 kawasan yakni : Eropa. Asia Pasifik, Arab, Afrika, Amerika Latin

2. Sejarah Gerakan Pramuka Indonesia

a. Masa Pensiagaan Nasional (1908-1928)

Berdirinya perkumpulan Budi Utomo pada tahun 1908 oleh dr Soetomo memberikan dorongan bagi tokoh pemuda Indonesia untuk berjuang memajukan bangsa dan negara melalui perluasan pendidikan yang berujung pada perjuangan kemerdekaan. Setelah Budi Utomo lahir, disusul oleh perkumpulan-perkumpulan lainnya yang bertujuan sama seperti Budi Utomo seperti Jong Java, Yayasan Obor

Pasundan, Indonesia Muda, Jong Ambon, dan masih banyak lagi. Diikuti kemudian muncul tokoh-tokoh muda seperti Moh. Syarief, Ki Hajar Dewantara, Rasuna Said, Maria Walanda Maramis, dan masih banyak lagi lainnya. Pada saat banyak semangat anak muda Indonesia berkobar dalam membentuk pergerakan-pergerakan. P.Y Smits dan Majoor de Yager mendirikan cabang *Nederlands Pavinders Organisatie* (NPO) bermarkas di Batavia tahun 1912, prtkumpulan ini dikhususkan bagi kaum muda Belanda. Sejak dibentuknya organisasi kepanduan oleh Boden Powell di Inggris pada tahun 1857, banyak sekali negara-negara lain yang mendirikan organisasi kepanduan di negaranya masing-masing salah satunya adalah negara Belanda tahun 1910. ⁵

Pada tahun 1914 terjadilah perang dunia I yang berdampak pada keputusan Kwartir besar di Belanda memutuskan bahwa NPO di Hindia Belanda harus bisa berdiri sendiri menjadi kwartir besar yang mandiri. Sehingga pada 4 September 1914 cabang NPO di Hindia Belanda berubah namanya menjadi *Nederland Indisce Pavinders Vereeniging* (NIPV). Organisasi yang baru tersebut menjadi organisasi yang eksklusif dengan hanya memperbolehkan anggota remaja dan pemuda dari Hindia Belanda secara tertentu dan terbatas, sesuai dengan *ethische koers*⁶ dalam politik Kolonial. Para pejuang bangsa Indonesia menilai bahwa organisasi *pavinders* merupakan cara yang ampuh untuk memperjuangkan kemerdekaan dan pembangunan bangsa.

⁵ Ade Darmawan,, *Peranan Pendidikan Kepramukaan Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di MA Daarul 'Ulum Lido Bogor*, (Jakarta : Skripsi Tidak Diterbitkan), hal. 8

⁶ *Ethische Politiek* adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumiputera.

Tahun 1916 atas prakarsa S.P Mangkunegara VII di Surakarta didirikan organisasi kepanduan nasional pertama di Hindia Belanda dengan nama *Javaanse Padvinders Organisatie* (JPO), disusul dengan munculnya organisasi Teruna Kembang untuk daerah Kesunanan dibawah pimpinan Pangeran Suryobrotp. Pada tahun 1918 atas prakarsa Kiyai Haji Ahmad Dahlan maka terbentuklah *Pavinders Muhammadiyah*⁷ yang kemudian pada tahun 1920 berubah nama menjadi Hizbul Wathon yang sampai saat ini dikenal sebagai HW atas pemikiran Sji radj Dahlan, Sarbini dan kawan lainnya. kemudian berdiri Wira Tamtama sebagai kepanduan dari Serikat Islan dengan promotornya A. Zarkasi. Kemudian masih ada *Nationale Padvinderij* yang didirikan oleh Budi Utomo; Syarikat Islam mendirikan *Syarikat Islam Afdeling Padvinderij* yang kemudian diganti menjadi *Syarikat Islam Afdeling Pandu* dan lebih dikenal dengan SIAP, *Nationale Islamietische Padvinderij* (NATIPIJ) didirikan oleh Jong Islamieten Bond (JIB) dan *Indonesisch Nationale Padvinders Organisatie* (INPO) didirikan oleh Pemuda Indonesia.

Sejak tahun 1912 hingga 1928 telah banyak organisasi kepanduan yang didirikan di Hindia Belanda, melihat fenomena tersebut maka pada tahun 1924 Belanda mengutus G. J Ranneft sebagai Komisaris Besar NIPV untuk mendekati pemimpin-pemimpin dari organisasi kepadandan di Hindia Belanda dengan mengadakan perkemahan di Dago, Bandung dengan membuka kesempatan bagi siapapun pemuda yang ingin bergabung. Pada 3 April 1926 Ranneft menyelenggarakan konferensi *Padvinderij* di kediaman KH Ahmad Dahlan

⁷ Zuli Agus Firmansyah.2015. *Panduan Resmi Pramuka*. Jakarta : Wahyu Media. hlm. 22-23

dengan mengundang seluruh pimpinan *Padvinderij* di Hindia Belanda untuk menyatukan semua organisasi tersebut melebur menjadi bagian dari NIPV.⁸ Namun tawaran tersebut ditolak oleh para pimpinan *padvinderij* karena berbeda orientasi. Melihat kondisi tersebut membuat pemerintah Belanda mengeluarkan larangan menggunakan istilah *Padvinderij* dalam kepanduan bangsa Indonesia, kemudian ditanggapi oleh KH. Agus Salim sebagai pendiri Syarikat Islam untuk mengganti istilah *Padvinderij* menjadi *pandi* atau *kepanduan* dalam Kongres SIAP tahun 1928 di Banjar Negara, Banyumas, Jawa Tengah. Didorong oleh semangat persatuan di kalangan kepanduan nasional Indonesia, maka pada tanggal 23 Mei 1928 dilangsungkan pertemuan di Jakarta dihadiri dr. Moewardi dari Pandu Kebangsaan, Mr. Soenarjo dari INPO, Mr. Kasman dari NATIPIJ dan Ramelan dari SIAP, dengan hasil pertemuan membentuk federasi dengan nama “Persaudaraan Antara Pandu Pandu Indonesia” yang disingkat PAPI yang beranggotakan Pandu Kebangsaan, INPO, NATIPIJ, SIAP dan PPS.

b. Masa Penggalangan kemerdekaan (1928-1943)

PAPI tidak bertahan lama karena kemudian dibubarkan dan berdirilah Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) pada 13 September 1930 yang dirintis oleh tokoh dari Jong Java Padvinders (JJP), Pandu Kebangsaan (PK), INPO dan PPS.⁹ KBI berasaskan kebangsaan, tidak berhaluan politik dan tidak menjadi bagian dari suatu partai/badan politik, tetapi tidak melarang pandu-pandu yang berusia 18

⁸ Humas Kwarnas.1987. *Patah Tumbuh Hilang Berganti*. Jakarta : Kwartir Nasional gerakan Pramuka. hlm. 15

⁹ Humas Kwarnas.1987. *75 Tahun Kepanduan dan Kepramukaan*, Jakarta:Kwartir Nasional gerakan Pramuka. hlm.3

tahun di luar kepanduan ikut dalam pergerakan politik. KBI memiliki tujuan untuk ikut serta mendidik putra dan putri Indonesia, supaya menjadi warganegara yang sehat, bahagia dan berguna untuk nusa dan bangsa; mempersatukan kepanduan yang berasaskan kebangsaan dan bersama-sama dengan organisasi kepanduan lain mengurangi rasa kedaerahan; meluaskan rasa cinta tanah air sampai seluruh prlosok wilayah nusantara, serta memberi dasar perjuangan dari bangsa Indonesia; menghasilkan tenaga yang sanggup memikul kewajiban yang berat untuk kepentingan Bangsa dan Tanah Air sebelum dan sesudah Indoesia merdeka.

KBI mulai bergerak setelah mengadakan kongres yang pertama di Ambarawa, Yogyakarta, pada akhir Desember 1930. Kongres tersebut juga dikenal dengan sebutan Jambore Nasional KBI I dihadiri 2/3 anggota cabang yang tersebar di Jawa, Madura dan Sumatra. Pada Juli 1931, KBI menggelar Pertemuan Pemimpin I di Purworejo dengan merumuskan dasar-dasar yang sampai saat ini masih berlaku diantaranya menetapkan wana “Merah Putih” sebagai warna setangan leher dan bendera KBI sesuai dengan asas kebangsaan, selanjutnya menyeshakan nyanyian KBI ciptaan Wr. Soepratman sebagai byanyian resmi KBI.

Selanjutnya Jambore Nasional KBI kedua dilaksanakan pada 19-21 Juli 1932 di Gunung Banyak, Malang (sekarang di daerah Batu) dengan diikuti 69 wakil-wakil cabang KBI, Jambore KBI yang ketiga dilaksanakan pada 20-24 Juni 1933 dengan mencetuskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, petunjuk permainan, peraturan mendirikan cabang, kemudian membentuk Kwartir

Daerah dibawah pimpinan Komisaris Daerah guna memperlancar jalannya pimpinan pusat. Tahun 1938 atas prakarsa KBI pada akhir bulan April 1938 di Solo, diadakan pertemuan bersama antara anggota kemudian merencanakan “All Indonesia Jambore” kemudian membentuk kepengurusan yang dinamakan Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia disingkat BPPKI berkedudukan di Solo.

Konfrensi BPPKI di Bandung pada tahun 1939 memutuskan merubah “All Indonesia Jambore” menjadi “Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemoem” disingkat Perkino. Kegiatan Perkino I diadakan di Yogyakarta pada tanggal 19-23 Juli 1941, dalam kegiatan ini cabang Mataram dan Badan Persaudaraan Kepanduan Mataram menjadi panitia penyelenggara diketuai oleh Dr. Martohusodo. Pada Maret 1942 tentara Jepang menduduki Hindia Belanda, kemudian mengeluarkan larangan untuk mendirikan partai dan organisasi yang ada, namun pada 6 Februari 1943 para pandu dari berbagai macam perkumpulan pandu yang telah dibubarkan kembali bertemu dalam Perkino II di Jakarta. Aktivitas tersebut didengar oleh pemerintah Jepang yang kemudian menangkap dan memaksa mereka bergabung dengan *Seinendan*.¹⁰ Setelah kemerdekaan Indonesia, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta dan membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja untuk mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia seluruh bangsa Indonesia.

¹⁰ Seinendan adalah sebuah organisasi barisan pemuda yang dibentuk tanggal 9 Maret 1943 oleh tentara Jepang di Indonesia. Tujuan dari organisasi seinendan ini adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Akan tetapi, maksud yang sebenarnya ialah untuk mempersiapkan pemuda Indonesia untuk membantu militer Jepang untuk menghadapi pasukan Sekutu.

c. Masa Pemegakan dan Pandegaan (1945-1961)

Periode 1945-1950

1. Perkembangan Kepanduan Putra

Kongres KPI dilaksanakan di Surakarta pada tanggal 27-29 Desember 1945 dihadiri mantan pimpinan kepanduan dari KBI, Hisbul Waton, SIAP, NATIPIJ, JPO, KAKI, Taruna Kembang, Tri Darma, Al Wathoni, Hizbul Islam, Sinar Pandu Kita, Kepanduan Rakyat Indonesia, Pandu Indonesia dan Pandu Pasundan yang berjumlah kurang lebih 300 orang. Pada kongres tersebut akhirnya diputuskan terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia yang berasaskan Pancasila.¹¹ Akhir Desember 1946 berlangsung Kongres Pandu Rakyat I di Surakarta dengan upaya mendapatkan pengesahan Pandu Rakyat Indonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan membuat Anggaran Dasar dan rencana teknis untuk digunakan sebagai tuntutan di cabang-cabang; mengkonsolidasi cabang-cabang Pandu rakyat Indonesia di seluruh Jawa, dengan mengadakan kunjungan anggota Kwartir Besar ke Cabang-cabang; mengatur hubungan dengan cabang-cabang di luar Jawa (Sumatera) dengan perantara radio; mengadakan latihan Pimpinan Pandu Rakyat yang pertama kali dengan diikuti oleh 70 orang dari hampir seluruh Jawa di Ambarwinangun, Yogyakarta.

¹¹ Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No.93/Bag. A, tertanggal 1 Februari 1947

Pandu Rakyat Indonesia didukung segenap pimpinan pandu dan diikat kuat dengan “Janji Ikatan Sakti” yang berbunyi : melebur segenap perkumpulan kepanduan Indonesia dan dijadikan satu organisasi kepanduan: Pandu Rakyat Indonesia; tidak akan menghidupkan lagi kepanduan lama; tanggal 28 Desember diakui sebagai hari Pandu bagi seluruh Indonesia; mengganti setangan leher yang beraneka warnanya dengan warna hitam. Kemudian pada tanggal 25 Maret 1947 Presiden Indonesia menerima manjadi pelindung Pandu Rakyat Indonesia dan pada tanggal 22 Agustus 1947 dibentuk Kwartir Besar Pandu Putri untuk mengurus segala hal mengenai kepanduan putri, di bawah kepemimpinan Ibu Soehariah Soetarman. Perkembangan Kepanduan Rakyat Indonesia terganggu pada saat terjadi agresi militer Belanda dan NICA yang membonceng sekutu, kemudian pertempuran antara bangsa Indonesia dengan sekutu karena Belanda mulai memperlihatkan tidak menginginkan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia.

Puncak pertempuran kembali terjadi sejak Belanda terang-terangan mengobarkan perang kolonial mulai tanggal 21 Juli 1947 yang dikenal dengan sebutan Agresi Militer I.¹² Dengan adanya serbuan militer Belanda di daerah-daerah Republik Indonesia, maka hubungan dengan cabang-cabang Pandu Rakyat Indonesia di daerah-daerah yang diduduki Belanda menjadi terputus mengakibatkan segala kegiatan kepanduan terhenti. Meskipun demikian,

¹² Agresi Militer Belanda I adalah operasi militer yang dilakukan Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera yang dimulai pada 21 Juli hingga 5 Agustus 1947. Tujuan utamanya adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Belanda berhasil menerobos ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

kepanduan masih terus berjalan dengan berbagai kegiatan Kwartir Besar Putra pada tahun 1948 meliputi : membentuk Kwartir Pusat wilayah Sumatera dibawah pimpinan dr. Sahir, berkedudukan di Bukit Tinggi; mengadakan suatu badan penghubung dengan daerah-daerah di luar RI, dipimpin oleh dr Moewadi (sebelum diculik bulan September; membentuk pos-pos depan (*voorposten*) Pandu Rakyat Indonesia di dalam daerah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur, serta di perbatasan garis demarkasi¹³ untuk memudahkan hubungan dengan Pusat Pimpinan di Yogyakarta; dan melanjutkan penyelenggaraan kursus pemimpin di luar daerah pendudukan di Jawa.

Tokoh-tokoh kepanduan berjuang dengan cara masing-masing menentang penjajahan Belanda di daerah masing-masing, tidak sedikit dari mereka kemudian gugur di medan pertempuran. September 1948 dr Moewardi salah satu tokoh pandu nasional, diculik Front Demokrasi Rakyat (FDK/PKI) dan hilang tanpa kabar. Tidak ditemukan dimana jasad dan makam beliau setelah kejadian tersebut. Tidak cukup sampai disana, Belanda juga mengeluarkan larangan beraktivitas bagi Pandu Rakyat Indonesia pada daerah-daerah yang mereka kuasai.

2. Perkembangan Kepanduan Puteri

Kepanduan Puteri sebenarnya telah terbentuk pada tahun 1927 sejak berubahnya *Jong Java Padvinderij* menjadi Pandu Kebangsaan yang anggotanya diperuntukkan bagi pemuda dan pemudi secara umum, dengan

¹³ Garis demarkasi adalah garis pemisah yg ditentukan di perundingan gencatan senjata oleh pihak yg berperang.

pertintis dalam pengembangannya seperti Ibu Soetji Soemarni (Ny Mohani Prasetiowinoto), Ibu Soerjandari (Ny. Dr. Santo), Ibu Umi, Titiék Darsono, Siti Rachmah, Mugarumah dan masih banyak lagi. Sejak saat itu, kepengurusan kepanduan puteri mengikuti perubahan dari kepanduan putra, mulai dari kemudian dibentuk Pandu Rakyat Indonesia dengan beberapa old guides itu masih ada yang aktif memegang pimpinan. Ketika dibentuk KBI maka pandu putri juga telah memiliki kepengurusannya sendiri dibawah pimpinan Ibu Soehariah Soetarman dibantu Ny Soetarmi Saleh, Aminah, Soenarti dan Prabandari. Kegiatan dalam tahun 1946 adalah sebagai berikut : menyelenggarakan kursus daerah bagi pemimpin Pandu Putri di Solo; menyampaikan instruksi kepada cabang-cabang bagian puteri tentang pakaian seragam, tanda-tanda dan penggantian nama-nama dengan istilah; mengirimkan sebagian petunjuk permainan kepada komisariss-komisaris daerah; selama Agresi Militer I tetap berusaha berkomunikasi antara daerah dan cabang.

Ketika Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 22 Agustus 1947, maka kepengurusan puteri memutuskan membentuk Kwartir Besar Puteri yang sejajar dengan Kwartir Besar Putra dengan nama Kwartir Besar Puteri Pandu Rakyat Indonesia. Namun karena terjadi Agresi Militer I yang membuat komunikasi antara pengurus besar dan cabang terputus sehingga tidak terjadi pergerakan selama masa tersebut dengan para anggota Kwartir Besar terpencar di daerah untuk membantu perang dengan menjadi perawat maupun pengurus dapur umum. Pada 22 Agustus 1949 guna menghidupkan kembali kepengurusan, maka dibentuk Kwartir Besar Putri Darurat guna memulihkan kembali aktivitas kepanduan puteri. Kwartir Besar

Puteri Pandu Rakyat Indonesia merupakan satu-satunya organisasi kepanduan puteri di Indonesia, yang sejak tahun 1948 memulai komunikasi dengan *World Association of Girl Guides and Girl Scout (WAGGGS)* sebagai organisasi kepanduan pusat yang menaungi kepanduan puteri di seluruh dunia.

Komunikasi tersebut dimulai dari hubungan *penfriend* antaraseorang pembina Pandu rakyat dengan Mrs. Collins yang kebetulan merupakan *Comisioner* dari Amerika, kemudian perbincangan dalam surat mereka dibawa ke World Conference XII (1950) yang mendapatkan tanggapan positif dari pimpinan WAGGGS. Pada tahun 1951 utusan dari WAGGGS yang diwakilkan pada Miss B.S Rustomjee seorang anggota *World Comitte* datang ke Indonesia selama satu bulan untuk meninjau dan melakukan pelatihan bagi Pandu puteri. Miss Rustomjee dalam kunjungannya berkeliling ke Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang dan Surabaya selama 3(tiga) pekan didampingi oleh para pengurus Kwartir Besar, kemudian pada minggu terakhirnya di Indonesia Miss Rustomjee melakukan kursus bagi pengurus Komisaris Cabang se-Jawa (hubungan dengan Sumatra masih terputus) diikuti oleh 27 orang Komisaris Cabang Putri.

Setelah kepulangan Miss Rustomjee dari Indonesia, maka Director of the World Bureau yaitu Dame Leslie Whately datang ke Indonesia selama 3 hari guna membicarakan masuknya Indonesia menjadi anggota WAGGGS, namun tidak terjadi kesepakatan antara pengurus Kwartir Besar dengan Whatley. Satu tahun berselang pada tanggal 2 Agustus 1952 perwakilan Kwartir Besar Putreri Pandu Indonesia melalui Ny. Sucipto dan Ny. D. Boenakim berangkat ke Inggris memenuhi undangan World Bureau mengikuti kursus Pembina Puteri di Inggris

Utara dan Selatan Selama 2 (dua) bulan. Kursus yang mereka ikuti meliputi : a course for Guide Brownies; a course for Range; a course for Prewarrant; a course for Commissioners; dan a course for Handcrafts. Kemudian pada tanggal 26 Juni 1975 Indonesia resmi bergabung sebagai Associate Member di WAGGGS.

Periode 1950-1961

Penandatanganan Pengakuan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949 berdampak pada dapat berjalannya kembali komunikasi antara Kwartir besar dengan Kwartir Cabang terutama di daerah selain Jawa. Kondisi tersebut membuat para anggota Pandu Rakyat berkumpul kembali dengan mengadakan kongres luar biasa di Yogyakarta pada tanggal 20-22 Januari 1950. Hasil dari kongres luar biasa tersebut adalah menerima konsepsi baru, yang memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan bekas organisasinya masing-masing; di samping mengadakan konsolidasi ke dalam, Pandu rakyat harus mulai melangkah keluar menuju pengakuan internasional; untuk memperingati genap 5 (lima) tahun tepatnya tanggal 28 Desember 1950 Pandu Rakyat Indonesia akan menerbitkan buku dengan judul Panca Warsa. Selain itu, hasil penting lainnya adalah perubahan gambar emblem Pandu Rakyat Indonesia dari emblem lama yang untuk golongan putra dan putri sama diganti dengan motif yang baru, yaitu : gambar bedon (ujung tombak) untuk putera dan gambar semanggi untuk puteri. Dengan adanya kesempatan bagi golongan pandu khusus menghidupkan kembali organisasinya, maka kemudian Hizbul Wathon (HW), SIAP dan Pandu Kristen kembali bergerak. Sedangkan daerah yang pernah

diduduki Belanda dan menjadi daerah bagian RIS terdapat pula organisasi kepanduan, yang menggabungkan diri kedalam Perserikatan Pandu Pandu (PPP).

Keputusan kongres luar biasa di Yogyakarta ternyata malah membelah Pandu Rakyat Indonesia, hal tersebut dengan disepakatinya aturan memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan bekas organisasinya masing-masing membuat beberapa golongan memutuskan keluar dan mendirikan kembali kepanduan lama mereka. Mulai dari Muhammadiyah dengan HW, NU dengan Pandu Ansor, Parindra dengan Pandu Surya Wiryawan, Golongan Katholik dengan Pandu Katholik, Golongan Kristen dengan Pandu Kristen. Kemudian KBI yang pernah menjadi salah satu organisasi kepanduan besar, bertepatan dengan wafatnya Pangeran Diponegoro pada 8 Januari 1952 menyatakan bangun kembali dan menerapkan tradisi lamanya. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat muncullah organisasi-organisasi kepanduan baru, yang dahulu pernah ada didirikan kembali dan yang telah bergabung dengan Pandu Rakyat menyatakan keluar untuk berdiri sendiri. Karena Pandu Rakyat bukan satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia, maka dengan putusan Menteri PP&K nomor 23441/Kab tertanggal 6 September 1951 dicabut pengakuan Pemerintah dikembalikan pada keputusan Menteri PP&K nomor 93/ Bab A tertanggal 1 Februari 1947 ditetapkan Pandu rakyat Indonesia sebagai satu-satunya perkumpulan yang dipercaya menyelenggarakan pendidikan kepanduan di seluruh Indonesia.

Respon atas keputusan pemerintah terhadap organisasi kepanduan dibuktikan dengan berkumpulnya kembali para tokoh kepanduan di Jakarta pada

tanggal 16 September 1951 sepuluh hari setelah diterbitkan keputusan pemerintah diatas. Konfrensi tersebut dihadiri oleh wakil wakil dari Pandu Rakyat Indonesia, Hizbul Wathon, Al Irsyad, Pandu Islam Indonesia, Kependuan Angkatan Muslimin Indonesia, Pandu Katholik, Perserikatan Kependuan Tionghoa (Pakerti) dan Perserikatan Pandu Pandu (PPP). Konfrensi ini memutuskan berdirinya suatu frederasi kependuan dengan nama Ikatan Pandu Indonesia disingkat Ipindo. Meskipun kedalam merupakan federasi, namun dalam hubungan dengan Wosm mereka tetap menggunakan Ipindo sebagai satu kesatuan.

Disamping organisasi-organisasi kependuan yang tergabung dalam Ipindo, masih banyak organisasi kependuan yang belum bergabung dengan Ipindo. Dibentuknya Ipindo ini juga merupakan jalan bergabungnya Indonesia dengan Wosm,¹⁴ Ipindo akan mewakili Indonesia dalam keanggotaanya sebagai bagian dari organisasi kependuan dunia dalam organisasi Wosm.

Pemerintah kemudian mengeluarkan keputusan Menteri PP&K No. 8977/Kab tanggal 12 Maret 1952 tentang pengesahan berdirinya Ipindo sebagai badan federasi kependuan dan sebagai badan sementara dalam hubungannya dengan Pemerintah RI melalui Kementrian PP&K. Kemudian terdapat lebih dari satu organisasi kependuan di setiap kota di Indonesia yang telah dibentuk Badan Persaudaraan Kependuan (BPK) sebagai usaha memperlancar hubungan persaudaraan dan kerjasama antara kependuan yang bersangkutan. Dengan telah

¹⁴ World Organization of the Scout Movement (WOSM) merupakan Organisasi Gerakan Kependuan tingkat dunia, merupakan organisasi mandiri, non-politik dan non pemerintah yang terdiri dari 161 Organisasi Kependuan Nasional/National Scout Organization (NSO).

disahkan Ipindo oleh Pemerintah Pusat maka BPK segera mengganti namanya sebagai Ipindo Daerah dan Ipindo Cabang.

Usaha Ipindo untuk bergabung dengan Wosm mendapat sambutan yang baik, namun untuk menjadi anggota Wosm maka Ipindo terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang lazim diberikan kepada organisasi kepanduan yang ingin bergabung, setelah terpenuhi syarat tersebut maka sebagai tindak lanjut dari Wosm dikirimkan utusan Colnel J.S Wilson yang membacakan surat keputusan tentang Pengakuan Biro Kepanduan Sedunia kepada Ipindo sebagai anggotanya pada tahun 1953.

Kegiatan Ipindo dimulai dengan diselenggarakannya kegiatan Desa Pandu dengan panitia penyelenggara adalah Pandu Rakyat Indonesia, Desa Pandu merupakan kegiatan yang dikemas dalam bentuk perkemahan besar tingkat nasional untuk anggota pramuka penegak dan pembina. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Pasar Minggu, Jakarta pada 11-16 Nopember 1954, dipimpin oleh Hs. Muthar. Desa Pandu merupakan kegiatan kepanduan pertama yang dikemas dengan konsep berkemah kemusian semua kebutuhan dipenuhi dengan swadaya dan gotong royong dari panitia dan peserta kegiatan, maka penerapan dari dan untuk telah dilakukan pada kegiatan tersebut. Dari peserta kegiatan, untuk peserta kegiatan tanpa adanya dana dari pemerintah dan sponsor,

Dalam rangka menyongsong kegiatan dasawarsa Negara Republik Indonesia, pada tahun 1955 Ipindo merencanakan penyelenggaraan Jambore Nasional dengan mengajak seluruh organisasi kepanduan yang ada. Sebagai percobaan, maka diselenggarakan kegiatan dengan nama Perpantun yang

merupakan singkatan dari Permusyawaratan Pandu Penuntun Nasional. Kegiatan tersebut dipercayakan kepada Ipindo Cabang Malang, diketuai oleh S.S Brotokusumo dengan peserta kegiatan 500 orang dari seluruh Indonesia.

Satuan kerabat kerja Penuntun yang dipimpin oleh Sudibjo Setyobroto dan A.T Birowo berperan sebagai sutradara sekarang dikenal dengan bidang kegiatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan meliputi ; persaudaraan, demonstrasi keterampilan, forum penuntun, api unggun wirasa, kerja bakti masyarakat dan kerja kelompok. Tujuan dari Perpantun pertama adalah mencari pengalaman serta pengenalan pandu-pandu dari berbagai macam organisasi kepanduan, boleh dikatakan berlangsung dengan baik dengan catatan segala kekurangan dihadapi dan diselesaikan dengan jiwa Penuntun yang selalu riang gembira.

Jambore Nasional Ipindo akhirnya terselenggara pada tanggal 10-20 Agustus 1995 di Karang Taruna Ragunan Pasar Minggu atas anjuran Kol. TNI dr. Aziz Saleh dan Letkol Pirngadi, kegiatan tersebut sekaligus untuk memperingati dasawarsa usia Republik Indonesia. Kegiatan Jambore Nasional tersebut terbuka untuk semua organisasi kepanduan yang ada, baik yang sudah tergabung dalam Ipindo maupun yang belum. Sekitar 6.000 orang Pandu dari seluruh wilayah di Indonesia hadir dalam Jambore tersebut, yang tidak kurang diwakili sekitar 82 macam organisasi kepanduan. Hal tersebut benar-benar diluar dugaan, mengingat anggota Ipindo yang tercatat hanya 66 organisasi Kepanduan. Selain kegiatan perkemahan dan kursus yang selama ini pernah dilaksanakan, Ipindo juga menyelenggarakan kegiatan Seminar Kepanduan Nasional yang diselenggarakan

pada tanggal 21-24 Januari 1957 di Tugu Bogor. Bertindak sebagai Pemimpin kegiatan adalah Sultan Hamengkubuwana IX yang menghadirkan ahli-ahli dalam bidang pendidikan disamping tokoh-tokoh kkepanduan, juga beberapa pejabat dari pemerintah. Seminar tersebut dihadiri 83 orang dari pelbagai organisasi kepanduan yang berada di Indonesia baik anggota Ipindo maupun bukan anggota Ipindo. Seminar tersebut menghasilkan suatu rumusan yang diharapkan menjadi syarat yang dapat mengikat antar organisasi Kepanduan di Indonesia, dengan demikian seluruh organisasi Kepanduan dapat dipersatukan. Kesimpulan rumusan adalah prinsip-prinsip pendidikan Kepanduan bersendikan kepada : kesukarelaan, janji dan undang-undang pandu, sistem beregu, dalam bentuk permainan, adanya kelas tanda kecakapan, hidup di alam bebas dan disesuaikan dengan umur.

Seminar Kepanduan kedua diselenggarakan oleh Departemen PP&K pada tanggal 22-27 Nopember 1958 di Coloto, dibawah pimpinan Menteri PP&K yaitu Prof. Dr. Prijono dengan tema "Penasionalan Kepanduan". Dari hasil seminar tersebut diharapkan dapat dijadikan dasar ketentuan, bahwa kepanduan di Indonesia harus bersifat nasional dan harus berkepribadian Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan resolusi Konfrensi Internasional di Denmark pada tahun 1924 dihadiri 34 negara yang menghasilkan kesepakatan bahwa organisasi kepanduan yang tersebar luas diseluruh belahan dunia dan masih akan berkembang terus itu harus bersifat nasional, internasional dan universal. Sifat nasional yang dimaksud adalah pelaksanaan pendidikan Kepanduan harus disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Perkembangan Kepanduan di Indonesia Tahun 1959-1961

Setelah banyak melakukan kegiatan di tingkat Nasional, mulailah Indonesia mengirimkan kontingen terdiri dari para penggalang putera dengan pimpinan dr. Soedarsono, dibantu oleh D, Soedibjo dan Hartono ke Jambore Dunia di Filipina pada tahun 1959. pada tahun yang sama, federasi kepanduan puteri dipimpin Ibu Soerjandari Santoso menyelenggarakan perkemahan besar tingkat Nasional, bertempat di Desa Semanggi Ciputat, Kabupaten Tangerang dengan Bung Karno selaku Presiden RI membuka kegiatan dengan pidatonya. Isi dari pidato Presiden tersebut menggambarkan kekecewaan hatinya dalam melihat pergerakan kepanduan yang terpecah belah dan saling bersaing ditengah upaya Pemerintah yang sedang berusaha bersatu dan melaksanakan pembangunan. Kemudian beliau juga menyampaikan telah berkonsultasi dengan Sri Sultan Hamengku Buwana IX yang merupakan Pandu Agung yang bermaksud menyatukan seluruh organisasi kepanduan menjadi satu nama yaitu Pramuka.

Pramuka yang dimaksud merupakan organisasi pendidikan anak-anak dan pemuda Indonesia yang tunggal dan nasional, yang besar dan kuat serta mampu mengemban amanat penderitaan rakyat. Kemudian sanggup menjadi pelopor pembangunan sesuai dengan filosofi namanya Pramuka yaitu mereka yang berada di muka atau prajurit teladan. Denikian inti dari pidato Bung Karno di Semanggi mengejutkan pendengarnya, karena telah hadir dari berbagai kalangan baik yang mendukung maupun tidak pada Kepanduan, bagi mereka yang tidak mendukung gerakan kepanduan terutama aliran kiri merasa bahwa pernyataan Presiden tersebut menjadikan alasan untuk memperkuat tuduhan bahwa kepanduan sudah tidak relevan dan tidak disukai masyarakat, sehingga

mereka mendesak Pemerintah untuk segera mengganti Kepanduan dengan Pramuka yang istilahnya kemudian diartikan menjadi Pioner nama dari gerakan anak-anak dan pemuda komunis.

Pemikiran golongan kiri tersebut, kemudian merasa perlu menentang pemikiran dari golongan kiri karena merasa bahwa sejak awal dibentuknya Kepanduan dasar yang dipakai adalah nasionalisme, ketika Indonesia merdeka maka otomatis dasar dari Gerakan Kepanduan adalah Pancasila yang kemudian nilai-nilainya ditanamkan dan digunakan dalam setiap kegiatan dan pertemuan kepanduan baik di tingkat cabang hingga pengurus besar.

Pertemuan dilakukan berkali-kali oleh tokoh Pandu guna mencari solusi dari keinginan Presiden tersebut. Pertemuan pertama, berlangsung pada tanggal 6-8 Mei 1960 dipimpin oleh Pandu Agung dengan mengundang Ir. H. Djuanda selaku pejabat Kepresidenan yang dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan pada peserta pertemuan bahwa negara telah kembali ke UUD 1945 sesuai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Dalam pertemuan tersebut, diambil keputusan sebagai berikut : Bapak Sri Sultan Hamengku Buwana IX diangkat menjadi Bapak Pandu dengan meniadakan sebutan Pandu Agung; menyusun kebijakan Federasi baru untuk memberi kesempatan pada semua organisasi Kepanduan masuk dalam Ipindo; terakhir mengesahkan AD dan ART baru. Selanjutnya kembali diadakan pertemuan ketiga, pada tanggal 19 Mei 1960 dengan Bapak Pandu mempertemukan ketiga badan Federasi Ipindo, Poppindo dan PKPI yang menghasilkan kebulatan kepemimpinan ketiga badan tersebut, untuk masuk ke persatuan kepanduan dibawah satu pimpinan,

Pertemuan ketiga pada tanggal 26-28 Mei 1960 menghasilkan keputusan sebagai berikut : Ipindo dinyatakan domisioner, para petugasnya menyerahkan mandatnya kepada Pandu-pandu; Ipindo bersama Poppindo dan PKPI meleburkan diri menjadi federasi baru Perkindo (Persatuan Kepanduan Indonesia); pimpinan harian Perkino dipegang oleh Bapak Pandu; menerima KPI menjadi anggota Perkindo. Sampai pertemuan ketiga, masih terjadi perbedaan pendapat diantara Pandu yang kemudian tercetuslah pertemuan berikutnya pada tanggal 5 Juli 1960 dengan kesepakatan sebagai berikut Bapak Pandu melantik anggota-anggota Dewan Kepanduan Nasional dan Kepanduan Bhayangkara diterima menjadi anggota Perkindo. Ipindo, Poppindo dan PKPI yang telah diintegrasikan menjadi Perkindo itu, berusaha keras untuk menjalankan tugasnya sebagai aparat yang mendapat kepercayaan dan kesempatan dari presiden untuk menghimpun dan mempersatukan seluruh potensi kepanduan yang ada, namun dengan sistem federasinya ternyata tidak berhasil. Sampai akhir tahun 1960 anggota-anggota Perkindo dan wakil-wakil organisasi yang duduk dalam Dewan Kepanduan Nasional hanya terdaftar sebanyak 61 orang, yang duduk sebagai wakil adalah dari 22 organisasi Kepanduan.

Sidang MPRS dari tanggal 19 Nopember sampai 3 desember 1960 membahas tentang pendidikan dalam Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana, khususnya yang menyangkut bidang pendidikan Kepanduan. Ketetapan MPRS yang menyangkut bidang Kepanduan adalah merupakan hasil secara maksimal yang dapat dicapai, yaitu sebagai berikut : dasar pendidikan di bidang Kepanduan adalah Pancasila; perlu diadakan penertiban dalam sistem Kepanduan;

pendidikan Kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana pemerintah untuk mendirikan Pramuka; Kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden Powellisme. Akhirnya gagasan Bung Karno yang disampaikan di Desa Semanggi pada tahun 1959 untuk mendirikan Gerakan Pramuka sebagai ganti Kepanduan.

Setelah dipertimbangkan dengan akal sehat, maka demi kepentingan persatuan dan kesatuan dan menyadari alasan-alasan yang telah disampaikan oleh Presiden adalah logis, akhirnya semua pihak dapat menerima dengan sikap yang lebih tegas yaitu : “Kesetiaanku terhadap organisasi akan kuhentikan, apabila kesetiaanku terhadap negara memanggil.” Pada 9 Maret 1961 para tokoh dan pemimpin pandu yang mewakili organisasi-organisasi Kepanduan yang bertindak sebagai mandataris MPRS yang berkewajiban melaksanakan ketetapan-ketetapan MPRS. Beliau mengambil keputusan tegas dengan membubarkan semua organisasi Kepanduan untuk dilebur menjadi satu organisasi yang diberi nama Gerakan Pramuka, sebagai satu-satunya organisasi yang diperkenankan menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia.

Pada hakekatnya Gerakan Pramuka terbentuk karena rasa tanggungjawab atas keselamatan, kemajuan, dan kesejahteraan bangsa dan negara, dan karena didorong oleh kesadaran dan keinginan untuk membantu Pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pembangunan, khususnya dalam bidang pendidikan untuk mempersiapkan anak-anak dan pemuda Indonesia menjadi tenaga pembangunan

G. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah tentang peranan Gerakan Pramuka dalam melakukan kegiatan bakti di Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang bersama anggota Wosm, kegiatan tersebut berdampak pada sosial, ekonomi dan pendidikan masyarakat Desa ditinjau dari sebelum dilaksanakannya kegiatan dan sesudah dilaksanakannya kegiatan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, dengan menggunakan metode penelitian sejarah, penulis dapat menghasilkan tulisan yang objektif dan mendekati kebenaran. Menurut Louist Gottschalk (1982:34), langkah-langkah penelitian sejarah meliputi (1) heuristik, mencari sumber-sumber; (2) kritik atau analisis, yaitu menilai sumber-sumber; (3) interpretasi atau sintesis, yaitu menafsirkan keterangan sumber-sumber; dan (4) historiografi, yaitu penulisan sejarah.¹⁵

Heuristik, langkah pertama dalam penelitian sejarah ini adalah dengan mencari sumber-sumber yang dapat mendukung berlangsungnya penulisan. Sumber sejarah secara umum terbagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan sumber data meliputi : observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan folklore (cerita lisan atau cerita rakyat).¹⁶ Pengumpulan sumber pada penelitian ini dimulai dengan observasi melalui catatan berkala berupa arsip-arsip surat kegiatan Comdeca yang didapatkan oleh penulis dari humas Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur, selanjutnya wawancara mendalam dengan pelaku kegiatan Comdeca yang

¹⁵ Priyadi, Sugeng.2012.*Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*.Yogyakarta : Penerbit Ombak. Hlm 3

¹⁶ Basri.2006.*Metodologi Penelitian Sejarah*.Jakarta: Restu Agung. Hlm. 58-67

masih hidup dan aktif dalam dunia kepramukaan. Dokumentasi diambil dari foto-foto kegiatan arsip Dewan Kerja Daerah Jawa Timur, perangko (sampul hari pertama) tahun 1993 dengan gambar kegiatan Comdeca. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat saat kegiatan Comdeca berlangsung, dapat ditanyakan oleh penulis kepada Bapak Marno selaku Kepala Desa Lebakharjo.

Kritik Sumber, tahapan penilaian terhadap sumber-sumber yang telah didapatkan sebelumnya, untuk dapat dilihat dari sudut pandang nilai yang sebenarnya. Kebenaran dari sumber-sumber sejarah harus dapat diteliti secara otentitas atau keotentikannya serta memiliki kredibilitas sehingga dapat teruji keasliannya. Guna mendapatkan fakta sejarah yang mendekati kebenarannya, maka pada tahapan kedua ini penulis melakukan kritik sumber ekstern dan kritik sumber intern. Dalam pemberlakuan kritik sumber ekstern pada sumber tertulis, maka harus diperhatikan adalah bahan yang dipakai, misalnya batu atau logam (prasasti), kertas (arsip atau manuskrip), jenis tinta, dan gaya huruf itu sezaman dengan huruf tersebut atau tidak (Kuntowijoyo, 1995 : 98-100).¹⁷ Pada penelitian ini, kritik ekstern dapat dilihat dari arsip surat menyurat di Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur sejak tahun 1990 sampai 1993 yang pada saat itu masih menggunakan mesin ketik manual, dengan kertas yang sudah usang dan menguning.

¹⁷ Priyadi, Sugeng. *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2012). Hlm, 62

Perlakuan terhadap kritik intern adalah dengan memperhatikan penilaian intrinsik terhadap sumber-sumber dan membanding-bandingkan kesaksian dari berbagai sumber agar sumber dapat dipercaya (diterima kredibilitasnya). Penilaian intrinsic terhadap suatu sumber dapat dilakukan dengan dua pertanyaan. Pertama, adakah ia mampu untuk memberikan kesaksian?. Kedua, adakah ia mau memberikan kesaksian yang benar? (Notosusanto, 1978 : 39-40).¹⁸ Pada penelitian ini, kritik intern dilakukan penulis dengan mewawancarai Bapak Muji selaku pelaku atau peserta kegiatan Comdeca asli Desa Lebakharjo dan Bapak Marno selaku Kepala Desa. Kemudian mencocokkan keterangan beliau dengan Waka Bidang Binawasa Kwarda Jatim yaitu Kak Bambang SW selaku panitia dari Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur pada saat kegiatan berlangsung.

Interpretasi, penafsiran yang dilakukan oleh peneliti atas fakta-fakta sejarah yang ditemukan meliputi *mentifact* (kejiwaan), *sosifact* (hubungan sosial) dan *artifact* (benda). (Kartodirdjo, 1992: 176). Dua hal yang harus dikerjakan peneliti yaitu analisis dan sintesis. (Kuntowijoyo, 1995 : 100-102). Dalam melakukan interpretasi pada penelitian ini, penulis menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lainnya sehingga dapat ditemukan rangkaian dari kejadian sejarah yang relevan dengan penelitian yang akan ditulis. Seperti adanya arsip dari Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur tentang surat tugas nomor 540/ST/1991 tentang survey ke lokasi World Comdeca I, selanjutnya didukung Laporan Survey Kelompok Kerja World Comdeca I Tanggal 14-17 Oktober 1991 tentang lokasi dan proyek yang akan dibangun dalam kegiatan Comdeca.

¹⁸ Ibid. Hlm, 67

Historiografi, merupakan tahap akhir dari metode penelitian sejarah. Tujuan penelitian adalah menjawab masalah-masalah yang telah diajukan. Penulisan sejarah sebagai laporan harus memperhatikan aspek kronologis, periodisasi, serialisasi, dan kausalitas.¹⁹ Kemampuan peneliti dalam menjaga kualitas dari penulisan sejarah dapat dicapai melalui penyusunan tulisan menurut peristiwa berdasarkan kronologi, tema, prinsip kebenaran dan kemampuan imaji agar dapat menghubungkan peristiwa yang terpisah-pisah menjadi satu rangkaian tulisan sejarah yang masuk akal dan mendekati kebenaran. Dalam penulisan ini, peneliti menulisnya berdasarkan fakta kejadian dimulai dari kondisi Desa Lebakharjo pada tahun 1990an dari segi pembangunan hingga dampak dari pembangunan tersebut pada tahun 2015.

Penunjukan Indonesia oleh Wosm sebagai tuan rumah kegiatan Comdeca, bagaimana Indonesia menjadi pelopor kegiatan bakti pertama di tingkat dunia pada saat itu, sehingga mampu mendapatkan kepercayaan untuk mendatangkan anggota kepanduan yang bernaung di bawah Wosm dari seluruh dunia untuk datang dan membangun Desa Lebakharjo. Jawa Timur tepatnya Kabupaten Malang sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan Comdeca oleh Kwartir Nasional, mengurai dari proses persiapan, proses kegiatan hingga berakhirnya kegiatan dengan dampaknya bagi masyarakat Desa Lebakharjo secara khusus dan masyarakat sekitar secara umum.

¹⁹ Ibid. hal 79

H. Sistematika Penulisan

Bab Pertama adalah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua adalah sejarah Kabupaten Malang dan Desa Lebakharjo pada tahun 1990 terutama pada sektor pembangunan. Bab ketiga adalah kepanduan di Indonesia hingga ditetapkan menjadi Gerakan Pramuka dan bergabung dengan *World Organization of the Scout Movement* sebagai wadah Gerakan Pramuka dunia. Bab keempat merupakan hasil penelitian lapangan. Dimana pada Bab ini akan terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai proses persiapan Kegiatan hingga pelaksanaannya yang dimulai dari tahun 1990-1993 dengan membuktikan fakta-fakta sejarah yang masih bisa digali lebih mendalam. Bab kelima adalah dampak dari Kegiatan Comdeca bagi masyarakat Desa Lebakharjo pada khususnya dan masyarakat disekitar Desa Lembahkarjo pada umumnya. Bab keenam merupakan penutup yang berisi simpulan penelitian.